

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR**



**MODEL KELEMBAGAAN LOKAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
TAMBRAUW SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI DI INDONESIA.**

Tahun I dari rencana 1 tahun

PENGUSUL

**Sepus M.Fatem, S.Hut., M.Sc
NIDN : 0025017704**

**DIBIYAI OLEH:
DIREKTORAT DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI DENGAN
PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

**UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI**

DESEMBER 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Model Kelembagaan Lokal Dan Strategi Pengembangan
Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi Di Indonesia**

Peneliti/Pelaksana :

Nama Lengkap : Sepus M. Fatem, S.Hut., M.Sc

NIDN : 0025017704

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Program Studi : Konservasi Sumberdaya Hutan

Nomor HP/email : [0812845303068](tel:0812845303068)/sepus_fatem@yahoo.com

Institusi Mitra :

Nama Institusi Mitra : -

Alamat : -

Penanggungjawab : -

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 Tahun

Biaya Tahun Berjalan : 50.000.000,-

Biaya Yang Diusulkan : 50.000.000,-

Mengetahui,
Lembaga Penelitian Unipa.



Manokwari, 20 September 2018
Ketua Peneliti,

Sepus M.Fatem, S.Hut., M.Sc
NIP. 19770125 2003 12 002

RINGKASAN

Penetapan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi memberikan konsekuensi terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tambrauw. Menggunakan kewenangan otonomi ganda, Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah menetapkan kebijakan politik Kabupaten konservasi sebagai agenda pembangunan daerah. Konsekuensi dari pencanangan Kabupaten Konservasi menuntut adanya perubahan tatakelola pemerintahan konvensional menuju tata kelola konservasi. Perubahan tata kelola akan terjadi ketika pemerintah daerah mampu menyiapkan strategi khusus dalam rangka mengimplementasikan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi. Model kelembagaan lokal dan strategi pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi inilah menjadi topik utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendesain model kelembagaan lokal kabupaten konservasi serta menyusun strategi pengembangan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, berlangsung selama 6 bulan dari November 2017 sampai April 2018 di Kabupaten Tambrauw; ditingkat provinsi Papua Barat dan ditingkat kementerian terkait. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang didekati dengan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi struktural, desk studi, focus group diskusi (FGD) dan observasi lapang. Lokasi penelitian dan sampel responden ditentukan secara purposive. Analisis data menggunakan analisis *research and development* (R & D) serta analisis SWOT. Untuk model kelembagaan lokal, didesain menggunakan 8 variabel kunci efektivitas kelembagaan sumberdaya alam yang ditawarkan oleh Ostrom (1990). Hasil penelitian telah menawarkan model kelembagaan lokal Tambrauw sebagai kabupaten konservasi. Pemerintah Kabupaten Tambrauw pun telah berupaya mendorong dan melegitimasi terbentuknya kelembagaan lokal dimaksud dengan sebut **“Badan Koordinasi Kabupaten Konservasi”**. Model ini dianggap sangat sesuai karena memiliki keterkaitan dan dengan kebutuhan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Struktur kelembagaan kabupaten konservasi di Kabupaten Tambrauw tidak melekat pada suatu lembaga atau berdiri sebagai institusi tersendiri melainkan suatu model birokrasi yang pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando. Sebagai contoh dalam model kelembagaan, posisi Bupati Kabupaten Tambrauw sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kabupaten konservasi, yang berperan memberikan instruksi dan menerima laporan kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan setiap satuan kerja perangkat daerah (OPD) baik yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan hidup (SDALH) maupun non SDALH yang menjalankan program dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja tahunan (RENJA). Sedangkan penelitian penyusunan strategi menggunakan analisis SWOT menunjukkan hasil analisis Faktor internal diperoleh 3 faktor kunci kekuatan yakni: Komitmen Politik Pemerintah Daerah dalam visi dan misi; Luas wilayah 77% merupakan Kawasan konservasi dan Potensi wisata yang dapat dikelola menjadi objek wisata. Sedangkan kelemahan antara lain: Pengetahuan masyarakat & OPD masih kurang terkait kabupaten konservasi, Kelembagaan adat yang belum terstruktur, Kurangnya pengawasan dan kontrol BBKSDA terhadap kawasan konservasi. Sementara faktor eksternal khususnya peluang antara lain: Penambahan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, Adanya kebijakan pembangunan KPH (Kesatuan pengelolaan Hutan-Konservasi, Berpotensi menjadi destinasi pariwisata. Sedangkan ancaman antara lain: Pencurian Satwa dan tumbuhan oleh pihak luar; Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat serta degradasi kearifan lokal akibat era-globalisasi.

Keyword: Kabupaten Konservasi, Tambrauw, Kelembagaan Lokal, Analisis SWOT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan laporan kemajuan Penelitian Disertasi Doktor (PDD) ini dapat terselesaikan. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan tatakelola pemerintahan melalui kabupaten konservasi merupakan sebuah inovasi terkini. Inovasi ini di dorong dengan memperhatikan ruang hukum yang ada pada tataran nasional dan lokal Papua. Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten di Papua Barat yang memiliki komitmen menjaga hutan dan melestarikan sumberdaya alam melalui konsep Kabupaten Konservasi. Konsep kabupaten konservasi selanjutnya dijadikan sebagai materi kajian disertasi dalam rangka penyelesaian studi kami.

Berkenaan dengan penyelesaian laporan kemajuan ini, maka ijin kami menyampaikan Ucapan terimakasih yang tulus atas bimbingan para promotor: Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc; Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For.Sc dan Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.For.Sc yang telah banyak membimbing dan mengarahkan peneliti. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kemenristekdikti yang telah membiayai bantuan disertasi ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan penggunanya.

Desember, 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	1
1.3. Urgensi (keutamaan) Penelitian	2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Kelembagaan	4
2.2. Strategi Pengembangan	7
2.3. Batasan dan Pengertian Kabupaten Konservasi	9
2.4. Road Map Penelitian yang dilaksanakan	11
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT	
3.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
3.2. Rencana Target Capaian Tahunan	13
BAB IV. METODE PENELITIAN	
4.1. Metode	14
4.2. Waktu, tempat dan penentuan lokasi	14

4.3. Pengumpulan Data dan Informasi	14
4.4. Analisis Data	15
4.5. Variabel dan data	16
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
5.1. Kelembagaan lokal Kabupaten Konservasi	19
5.2. Analisis SWOT	23
BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	
6.1. Rencana Tahap Seminar Hasil	25
6.2. Rencana Tahap Pasca Seminar Hasil dan Ujian Disertasi	25
6.3. Rencana Tahap Selanjutnya setelah Ujian Disertasi	25
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN	26
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rencana target dan capaian	13
Tabel 2. Data Responden dalam penelitian Analisis SWOT	18
Tabel 4. Analisis SWOT pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi	23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. <i>Road Map</i> penelitian	12
Gambar 2. Bagan Penelitian	15
Gambar 3. Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi	21

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Jurnal Land Use Policy –Elsevier –Q1	29
Lampiran 2. Surat keterangan pengiriman jurnal dari Jurnal PSDL IPB Bogor	30

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tambrauw merupakan Kabupaten pemekaran di Papua Barat sejak tahun 2008 dengan luas 11,592.182 Km², secara geografis wilayah ini terletak di bagian utara wilayah Kepala Burung atau wilayah utara Provinsi Papua Barat. Sekitar 82 % wilayah ini adalah hutan konservasi dan hutan lindung sesuai Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian Jaya dalam SK.Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999 (BAPLAN, 2005). Dengan wilayah yang luas, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keragaman budaya dan penghidupan masyarakat yang hidup didalamnya, Tambrauw menjadi bagian di Papua yang menantang untuk dikelola dalam rangka mewujudkan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Dengan status sebagai wilayah yang hampir kesemuanya hutan lindung dan hutan konservasi, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menemukan bentuk pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang baik, berkelanjutan dan bermanfaat. Skenario pengelolaan sumberdaya alam dan tata kelola pemerintahan yang ditempuh yakni melalui pencanangan kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten konservasi. Pencanangan diri merupakan wujud dari ‘*kontrak sosial*’ yang perlu direspon secara nasional baik dari sudut pandang politik, hukum, kebijakan, kelembagaan dan tata pemerintahan, maupun teknis tanpa mengabaikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah bidang pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. Kabupaten Tambrauw di Papua Barat merespon peluang ini dengan mendorong dirinya untuk secara *voluntary* akan dicanangkan sebagai kabupaten konservasi sesuai ciri dan karakteristik wilayahnya serta misi yang sudah ditetapkan. Misi kelima kabupaten ini adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan menetapkan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi (Bappeda Tambrauw, 2011; Asem *et al*, 2011). Misi ini telah mendapat dukungan legal berupa Peraturan Daerah Kabupaten Konservasi. Kabupaten konservasi dimaknai sebagai wilayah administratif pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (Kartodiharjo, 2005)

1.2. Permasalahan

Implementasi kabupaten konservasi bisa dilihat sebagai strategi pengelolaan kawasan konservasi di era desentralisasi-resentralisasi. Pengintegrasian ini tentunya menjadi sebuah

model manajemen adaptif kawasan konservasi sesuai aspirasi dan kebutuhan lokal daerah dengan tetap memperhatikan ruang hukum dan kebijakan yang ada. Penetapan kabupaten Tambrauw menjadi Kabupaten Konservasi, akan diawali melalui penancangan oleh Bupati Tambrauw. Penancangan ini harus dibarengi dengan kesiapan diri berupa paket kebijakan, pendanaan, sumberdaya manusia, *reinventing* tata kelola dan instrumen lainnya (Obsern and Gaebler (1993). Disisi lain, keberadaan kabupaten konservasi harus bisa memberikan kepastian dan jaminan bahwa akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam tetap ada dan masyarakat adat memiliki jaminan penghidupan melalui praktek-praktek kelokalannya atas sumberdaya dari kawasan konservasi tersebut (Mc Neely, 2009). Beberapa aspek penting pengembangan Kabupaten Konservasi seberapa besar tingkat kesiapan pemerintah dan masyarakat sesuai kriteria dan indikator penetapan kabupaten konservasi, model kelembagaan lokal, pihak-pihak yang akan terlibat dan memiliki pengaruh dalam pengelolaan kabupaten konservasi serta peta jalan (*road map*) pengembangan Kabupaten konservasi. Data dan informasi yang dijelaskan diatas, saat ini menjadi *urgent* bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pengelolaan kabupaten konservasi. Berdasarkan kondisi di atas, maka dua (2) pertanyaan kunci dalam kerangka proses penelitian ini adalah 1) bagaimana model kelembagaan lokal dalam pengelolaan kabupaten Tambrauw sebagai konservasi ? serta 2) bagaimana strategi pengembangan Tambrauw Sebagai kabupaten konservasi ?

1.3. Urgensi (keutamaan) Penelitian

Penelitian tentang kelembagaan lokal dan strategi pengembangan Kabupaten konservasi merupakan bagian dari kajian disertasi secara utuh mengenai Pengembangan Kabupaten Konservasi Sebagai Strategi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Adaptif Di Era Desentralisasi–Resentralisasi (Studi Kasus Kabupaten Tambrauw, Di Provinsi Papua Barat). Penelitian ini akan menjadi langkah awal dalam menggambarkan rancangan disertasi tersebut, dengan menggunakan analisis R dan D serta analisis SWOT yang dilakukan dengan beberapa tahapan yakni wawancara, FGD, hingga uji coba untuk melihat dinamika dan kesesuaian model kelembagaan serta strategi yang bisa diadopsi pemerintah dalam rangka mengembangkan Kabupaten Konservasi. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga akan diketahui faktor-faktor yang penting dalam

merancang model kelembagaan lokal serta faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi pengembangan Kabupaten Konservasi.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terkait dengan hasil analisisnya mampu menemukan model kelembagaan lokal yang mampu mengakomodir tata kelola pemerintahan disatu sisi dan kewenangan konservasi sumberdaya alam hayati disisi lain, serta strategi yang bisa diadopsi pemerintah daerah dalam rangka mengsinergikan pembangunan pemerintahan dan program konservasi sumberdaya alam secara berkelanjutan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Kelembagaan

Sistem kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Kelembagaan mempunyai peran yang sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah nyata dalam pembangunan. Kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur dan mengontrol interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui inovasi dalam *property right* (hak kepemilikan), aturan representative atau batas yuridiksi (Pakpahan, 1989). Selanjutnya Pakpahan (1989) menyatakan bahwa dalam dunia nyata kelembagaan dapat menjadi perubahan eksogen dalam proses pembangunan, dengan demikian kelembagaan menyebabkan perubahan. Disisi lain, kelembagaan dapat menjadi peubah endogen, sehingga kelembagaan merupakan akibat dari perubahan pada sistem yang lain.

Terdapat 2 jenis pengertian kelembagaan, kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi. Schimid (1987) mengartikan kelembagaan sebagai; pengaturan hubungan antara individu yang didefinisikan haknya, pengaturan hak lain, hak istimewa dan tanggungjawabnya. Karena itu kelembagaan adalah suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya. Dipandang dari sudut individu, kelembagaan merupakan gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dalam melaksanakan aktivitas.

Ciri Utama kelembagaan

Kelembagaan dapat di cirikan dengan tiga hal utama yaitu: **1) Hak kepemilikan** (*property right*), **2) batas yuridiksi**, **3) aturan representative** (Schalfer dalam Pakpahan 1989).

Hak Kepemilikan (Property right)

Konsep *property right* mengandung makna sosial. Konsep ini muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) yang didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat dan tradisi, atau consensus yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Karena itu pernyataan hak milik memerlukan pengesahan dari masyarakat dimana mereka berada. Impilksi dari hal ini adalah; 1) hak seseorang adalah kewajiban orang lain, 2) hak yang dicerminkan oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuatan untuk

sukses dan control terhadap sumberdaya. Hak dapat diperoleh melalui pembelian apabila barang atau jasa dapat diperjualbelikan, pemberian atau hadiah atau pengaturan administratif. Tietenberg (1994) menyatakan bahwa struktur hak kepemilikan yang dapat menghasilkan alokasi sumberdaya secara efisien mempunyai empat karakteristik yaitu:

- **Universality**, seluruh sumberdaya (asset) dimiliki secara individu dan seluruh hak-hak atas penggunaan sumberdaya tersebut di definisikan dengan jelas.
- **Exclusivity**, seluruh biaya yang dibelanjakan dan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan sumberdaya tersebut harus di tanggung/dinikmati hanya pemiliknya.
- **Transferability**, hak kepemilikan harus dapat dipindahkan-tanggankan dari pemilik yang satu ke pemilik yang lain secara sukarela.
- **Enforceability**, hak kepemilikan harus aman dari kemungkinan gangguan pihak lain.

Menurut Tuner et al (1994) bentuk kepemilikan secara umum dibagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Hak milik yang bersifat umum (*common property right*)

Dipandang dari segi ekonomi, pemilikan yang demikian sebenarnya bukan merupakan hak milik karena barang yang dimiliki secara umum merupakan barang yang dapat di gunakan oleh setiap orang untuk berbagai keperluan tanpa adanya biaya yang dikeluarkan, misalnya udara, air, sungai, dll.

2. Hak umum yang terbatas

Umumnya asset masyarakat dikelola oleh sesuatu badan public atau pemerintah. Pemerintah dapat membatasi penggunaan hak milik dengan berbagai cara.

3. Hak pakai (*status tenure*)

Pemakai asset dibatasi hanya untuk orang-orang atau badan-badan tertentu yang ditetapkan berdasarkan hukum. Dengan demikian pemilikan menjamin pemakaian asset sesuai dengan kewenangan atas pemilikan tersebut. Hak pakai dapat dipindah tanggankan.

4. Hak milik penuh (*private property right*)

Dalam hal ini hak milik dapat dpindahkan dan pemindahan sesuatu asset mengarah pada terbentuknya harga yang sebenarnya. Hal ini berarti hak milik dapat dipindahkan hak milik akan menjadi harga. Sesuatu yang dimiliki dapat dihargai dan sesuatu yang berharga dapat dimiliki

tetapi hubungan fungsional antara harga dan milik sulit ditentukan secara tepat. Walaupun hak milik ini merupakan dasar konsepsi pemilikan dalam masyarakat, namun hak milik tersebut perlu dibatasi guna mencegah munculnya kesenjangan sosial.

Batas Yuridiksi

Batas Yuridiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu kelembagaan masyarakat. Konsep batas yuridiksi dapat berarti wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki sesuatu institusi atau mengandung makna kedua-duanya. Implikasi ekonomi dari batas yuridiksi adalah batas bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan areal hutan, jenis hasil hutan yang dimanfaatkan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai cara untuk melestarikan hutan. Keefektifan dari batas yuridiksi terhadap kinerja ditentukan oleh empat hal utama yaitu: 1) **perasaan sebagai satu masyarakat** (*sense of community*), 2) **eksternalitas**, 3) **Homogenitas**, dan 4) **skala usaha**.

➤ **Perasaan Sebagai Satu Masyarakat** (*Sense of community*).

Perasaan sebagai satu masyarakat merupakan variabel psikologi penting yang sering diabaikan dalam analisis ekonomi. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. *Sense of community* ini menentukan siapa yang termasuk dalam suatu masyarakat dan siapa yang tidak. Hal ini erat kaitannya dengan konsep jarak sosial (*social distance*) yang akan kadar komitmen yang dimiliki oleh suatu masyarakat terhadap suatu kebijakan.

➤ **Homogenitas**

Preferensi masyarakat dalam kaitannya dengan konsumsi atas barang dan jasa yang dikonsumsi secara kolektif berkaitan dengan siapa yang memutuskan jawaban atas pemanfaatan barang dan jasa. Adanya homogenitas preferensi dan distribusi individu masyarakat yang memiliki preferensi yang berbeda akan mempengaruhi keputusan.

➤ **Aturan representatif**

Aturan representative merupakan perangkat aturan yang menentukan pengambilan keputusan organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan organisasi, terdapat 2 jenis biaya yang mendasari keputusan yaitu (1) membuat keputusan sebagai produk dari partisipasi dalam membuat keputusan dan (2) biaya eksternal yang ditanggung oleh seseorang atau sebagai akibat

keputusan organisasi tersebut. Aturan representative akan mempengaruhi struktur dan besarnya biaya tersebut. Aturan pengambilan keputusan yang sederhana untuk masalah ini adalah meminimalkan kedua biaya. Aturan representative mengatur siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan.

Perubahan kelembagaan

Perubahan kelembagaan mengandung arti paling tidak dari batas yuridiksi, *property right* atau *aturan representative*. Perubahan kelembagaan akan mempengaruhi kinerja masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, jika masyarakat dalam hubungannya dengan komoditas atau *goods* yang dihasilkan. Menurut Schmid 1987, situasi sebagai dasar sumber independensi meliputi inkompatibilitas, biaya eksklusi tinggi, skala ekonomi, *joint impact goods*, biaya transaksi dan interdependensi antar generasi. Sumber interdependensi dapat menyebabkan suatu perubahan kelembagaan yang berpengaruh terhadap suatu bentuk organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah.

2.2. Strategi pengembangan

Strategi adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang semuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dengan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Kasali (2010) menjelaskan bahwa strategi adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Strategi adalah kekuatan sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti internal untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan persaingan. Strategi juga dapat di definisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Lebih lanjut Ciputra (2002), mengatakan bahwa pengembangan sebagai suatu perubahan dalam diri orang yang memungkinkan yang bersangkutan bekerja efektif. Sedangkan menurut Rangkuty (2003) menyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) menyatakan bahwa

pengembangan adalah cara atau hasil kerja mengembangkan sesuatu (pekerjaan, usaha, kepribadian dan lain sebagainya). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang memberikan informasi, pengarahan, pengaturan, dan pedoman dalam pengembangan usaha. Perusahaan atau Usaha Kecil dan Menengah ataupun sebuah organisasi harus memiliki perencanaan strategis. Suatu perusahaan atau organisasi dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Pemimpin perusahaan atau organisasi harus berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal dan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) suatu pasar. Proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi-strategi itu disebut perencanaan strategis. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas, fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing. Perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing (Rangkuty, 2003).

Rangkuty (2003) menjelaskan analisis SWOT sebagai analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian rencana strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk menganalisis situasi semacam ini adalah Analisis SWOT.

Pengembangan Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi perlu dilakukan dengan mempersiapkan *road map* sebagai tahapan pencapaiannya. Tahap awal analisis SWOT dilakukan dengan melakukan inventarisasi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang ada pada kabupaten Tambrauw. Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam kabupaten Tambrauw serta faktor-faktor lainnya diluar faktor internal yang turut mendukung. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang

berasal dari luar kabupaten Tambrau, namun turut mempengaruhi kebijakan Kabupaten Konservasi. Kemudian dilakukan analisis SWOT untuk menentukan nilai skala peringkat faktor-faktor SWOT (Rangkuty 2003; Humphrey, 2005). Analisis pengembangan Kabupaten Konservasi dilakukan secara SWOT. SWOT diaplikasikan untuk melihat secara lebih luas gabungan setiap aspek baik masyarakat, pemerintah dan lingkungan yang berpengaruh bagi implementasi Kabupaten konservasi di Tambrau. Hasil observasi di lapangan dan analisis data SWOT dapat menggambarkan kemungkinan adanya potensi dan permasalahan yang ada, sehingga dapat diketahui permasalahan secara komprehensif dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2.3. Batasan dan Pengertian Kabupaten Konservasi

Menurut Husin, (2005), batasan Kabupaten Konservasi adalah kabupaten yang tata wilayahnya memiliki kawasan konservasi luas (*"magnitude"*) dan tingkat kepentingan (*"importance"*) yang signifikan secara global, nasional atau regional. Sedangkan pengertian Kabupaten Konservasi secara operasional yaitu wilayah administratif yang mempunyai komitmen politik untuk menjalankan pelaksanaan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan system penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati (Husin, 2005). Pilihan optimum dari Kabupaten Konservasi adalah pembangunan wilayah berbasis konservasi sumberdaya alam (*conservation-based development*). Lebih lanjut Husin, 2005 menjelaskan bahwa Kabupaten Konservasi dapat diartikan ke dalam tiga aspek, yaitu :

1. Sebagai suatu wilayah kabupaten yang memiliki kesatuan ekosistem dan seluruh dinyatakan aktivitas pembangunannya mengadopsi secara utuh konsep konservasi sumberdaya alam, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Dalam hal ini, pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan secara bijaksana dengan prinsip kehati-hatian dan mempertahankan kelestarian persediaan, keanekaragaman dan fungsinya.
2. Aktivitas pembangunan yang bertumpu pada penyelamatan lingkungan tidak dapat diartikan semata-mata pada upaya menjaga kelestarian serta rehabilitasi hutan tanpa memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki. Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan mengadopsi prinsip pengelolaan sumberdaya alam lestari. Dalam pemanfaatan sumberdaya alam, konservasi ekosistem alam sejauh mungkin dihindarkan, sehingga setiap aktivitas

pemanfaatan sumberdaya hutan tidak menimbulkan terjadinya lahan kritis dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.

3. Restorasi dan rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan untuk memulihkan fungsi ekologi dengan mengedepankan capital sosial yang tersedia.

Kriteria dan Indikator Kabupaten Konservasi

Kabupaten yang mencanangkan diri sebagai Kabupaten Konservasi dan mampu membuktikan kinerja pembangunan wilayah berbasis konservasi patut mendapatkan penghargaan yang memadai dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga-lembaga swadaya, maupun dunia internasional (Husin, 2005). Wujud penghargaan tersebut sangat beragam, baik berupa pengakuan atas eksistensi kabupaten dalam masyarakat global, promosi, bantuan bagi pembangunan wilayah dan penguatan kapasitas kabupaten, maupun bentuk-bentuk penghargaan lainnya (Kartodihardjo 2005). Proses-proses yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang mencanangkan diri menjadi kabupaten konservasi menurut Kartodihardjo (2005) terdiri dari :

1. Pencanaan Kabupaten Konservasi dilakukan berdasarkan proses-proses local yang secara independen dilakukan daerah dan dapat dibantu oleh para pihak yang mendukung tujuan Kabupaten Konservasi, baik LSM, Organisasi kemasyarakatan, lembaga penelitian/pendidikan, pengelola kawasan konservasi maupun swasta, dapat membantu percepatan proses perencanaan melalui program-program pendampingan.
2. Pengusulan Kabupaten Konservasi, dimaksudkan secara spesifik sebagai mekanisme legal untuk mendapatkan insentif yang berkaitan dengan Kabupaten Konservasi. Pengusulan Kabupaten Konservasi merupakan mekanisme yang bersifat sukarela (*voluntary*), namun bagi Kabupaten Konservasi yang telah ditetapkan memiliki konsekuensi yang bersifat *mandatory*.
3. Kabupaten Konservasi yang telah ditetapkan memiliki kewajiban untuk menyusun dan/atau menyepakati program pembangunan jangka panjang dengan pemerintah pusat, sehingga arah dan kinerja pembangunannya sejalan dengan tujuan penetapan Kabupaten Konservasi. Dalam tahap ini, dukungan dari para pihak melalui program-program pendampingan dan

penguatan kapasitas daerah, baik asistensi teknis, pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia, maupun pendanaan, dapat dilakukan.

4. Tahap Implementasi Program yang didasarkan atas rencana jangka panjang yang disusun dan ukuran-ukuran kinerja yang sejalan dengan tujuan kabupaten konservasi. Dalam tahap ini, penguatan kapasitas daerah menuju tata praja yang baik (*good governance*) merupakan proses-proses pembelajaran yang harus selalu dievaluasi bersama.

Penetapan Kabupaten Konservasi

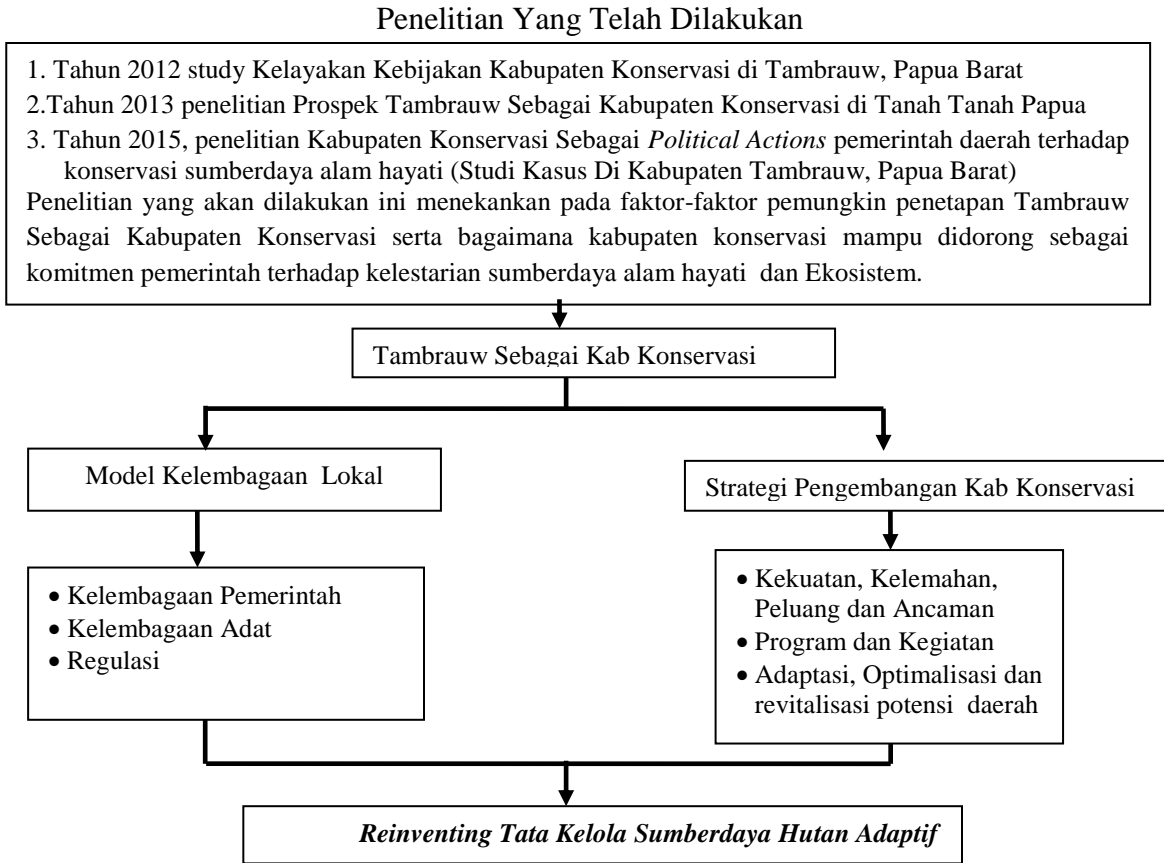
Berdasarkan pengertian Kabupaten Konservasi, yaitu: “sebagai wilayah administratif yang melaksanakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu,” menunjukkan perlunya seperangkat kriteria dan indikator untuk menetapkan sebuah kabupaten menjadi Kabupaten Konservasi yang secara biofisik mempunyai keterbatasan (Tim Kecil Kabupaten Konservasi, 2006).

Penetapan status Kabupaten Konservasi merupakan pilihan politik masyarakat dan pemerintahannya sehingga harus melibatkan proses yang baik dan benar. Perlu dilakukan penilaian pada Pemerintah kabupaten yang mengajukan diri sebagai calon Kabupaten Konservasi dengan mekanisme yang jelas dan melibatkan semua pihak yang menanggung konsekuensinya (Kartodihardjo, 2005)

2.4. Road Map Penelitian yang dilaksanakan

Model kelembagaan dan strategi pengembangan Kabupaten konservasi sangat urgent dan menjadi isu utama dalam rangkaian proses pengembangan Kabupaten Konservasi. Bagi pemerintah daerah, kebijakan kabupaten konservasi pada tataran regulasi sudahlah sangat penting dan cukup, mengingat kabupaten konservasi masih sangat langka dan merupakan kebijakan lokal yang didorong secara *voluntary*, sementara secara teoritis ide dan kebijakan Kabupaten konservasi haruslah memiliki tata kelola serta program yang berbeda dengan kabupaten konvensional. Pengarustamaan konservasi harus menjadi isu sentral dalam penyusunan kebijakan, program dan strategi setiap unsur perangkat daerah (OPD), sehingga menjadi masalah yang perlu dipelajari oleh peneliti. Beberapa kajian awal tentang kabupaten konservasi telah dilakukan meski masih terbatas dan pada aspek tertentu saja.

Road map penelitian digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Road Map penelitian

Kajian model kelembagaan lokal yang sementara dirancang untuk diterapkan oleh pemerintah daerah serta strategi pengembangan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, diharapkan dapat memberi gambaran lengkap tentang *reinventing* tata kelola sumberdaya hutan adaptif melalui implementasi Tambrauw kabupaten konservasi yang belum diteliti selama ini.

III. TUJUAN DAN MANFAAT

3.1. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan uraian latar belakang maka terlihat dengan jelas bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan *reinventing* pemerintah daerah terkait dengan tata kelola sumberdaya hutan adaptif melalui kebijakan kabupaten konservasi. Oleh karena tujuan khusus penelitian ini antara lain (1) Merancang model kelembagaan lokal bagi pengelolaan Kabupaten konservasi sebagai unit layanan yang melakukan proses penataankelolaan dan (2) Merumuskan strategi pengembangan Tambrau sebagai Kabupaten konservasi. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terkait dengan hasil analisisnya dimana mampu menemukan model kelembagaan lokal yang mampu mengakomodir tata kelola pemerintahan disatu sisi dan kewenangan konservasi sumberdaya alam hayati disisi lain, serta strategi yang bisa diadopsi pemerintah daerah dalam rangka mengsinergikan pembangunan pemerintahan dan program konservasi sumberdaya alam secara berkelanjutan.

3.2. Rencana Target Capain Tahunan

Diharapkan dari kajian ini akan menghasilkan naskah publikasi ilmiah yang direncanakan akan diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi (Q1) atau minimal pada jurnal terakreditasi nasional (Journal Pengelolaan Sumberdaya Alam IPB Bogor) dan selanjutnya akan dijadikan sebagai materi dalam buku yang ditulis oleh peneliti. Secara ringkas rencana capaian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana target dan capaian

No	Jenis luaran publikasi ilmiah	Indikator
1.	Internasional bereputasi	published
2.	Nasional terakreditasi Published	Draf pertama sudah kirim /Waiting deciosion
3.	Buku Teks	Draft dalam proses

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Metode

Sesuai tujuan penelitian, maka penelitian implementasi kabupaten konservasi merupakan penelitian studi kasus yang didekati dengan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dimana sampel penelitian akan merujuk pada situasi sosial (*social situation*) yang terdiri atas tiga aspek yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu (Sugiyono, 2011).

4.2. Waktu, tempat dan penentuan Lokasi

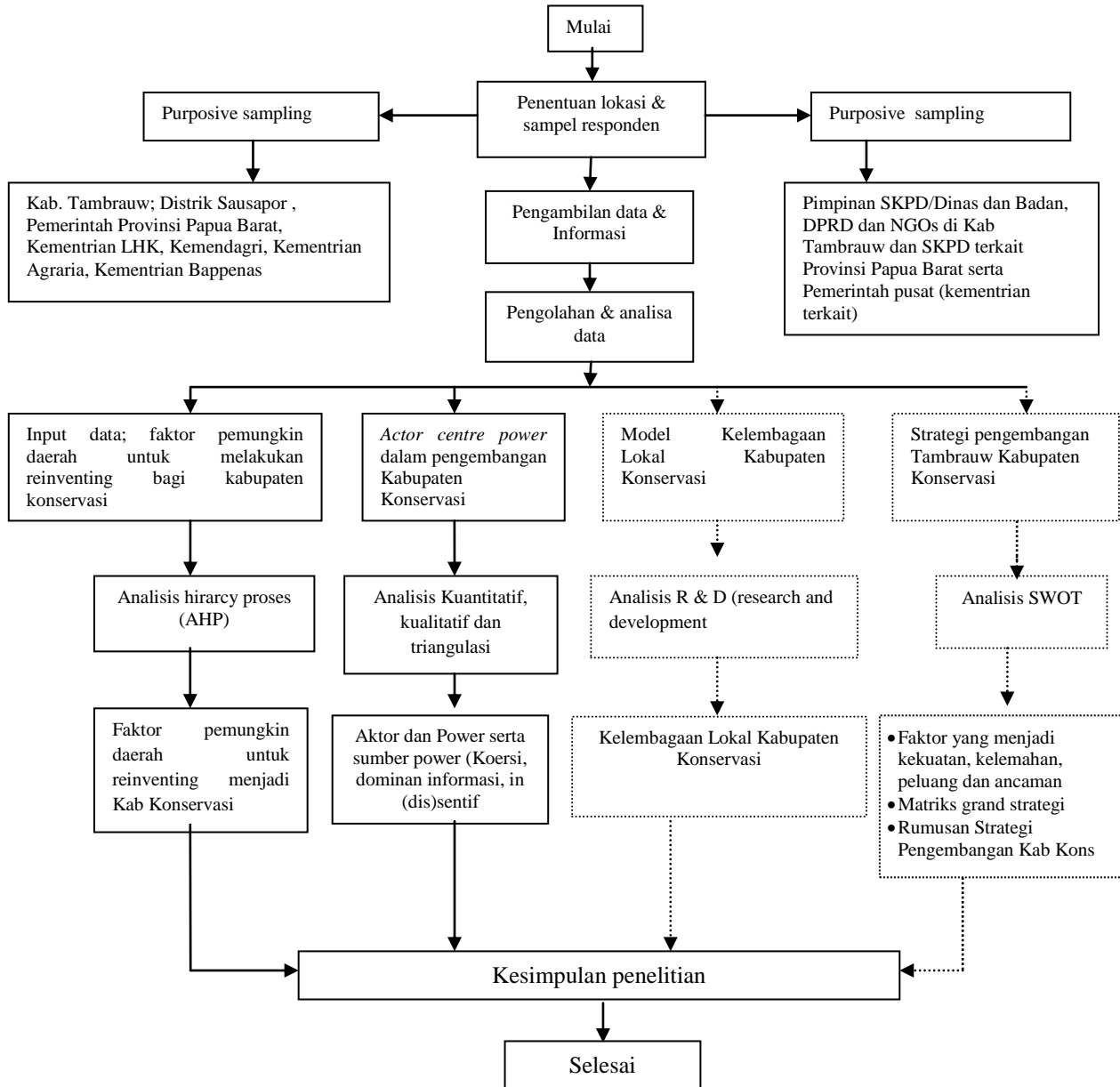
Untuk menjawab tujuan penelitian berupa model kelembagaan lokal kabupaten konservasi, maka penelitian dilaksanakan di distrik Sausapor, di Provinsi Papua Barat maupun di tingkat kementerian terkait. Sementara tujuan penelitian strategi pembentukan Kabupaten konservasi, pengambilan data dilakukan di beberapa distrik di Kabupaten Tambrauw Tambrauw. Penelitian berlangsung pada 2 periode waktu: sejak November 2017 sampai April 2018.

4.3. Pengumpulan Data dan Informasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari responden melalui wawancara, observasi proses diskusi group terfokus (FGD) dan kajian dokumen perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan penelitian.

4.4. Metode Analisis Data

Bagaian Alir keterkaitan tujuan, metode dan variabel penelitian disertasi dan penelitian ini disajikan pada bagan berikut:



Keterangan :

- : Bagian penelitian yang diajukan dalam penelitian disertasi doktor
- : Bagian penelitian yang tidak diajukan dalam penelitian disertasi doktor

Gambar 2. Bagan Penelitian

4.5. Variabel dan Data

Desain model kelembagaan

Untuk menghasilkan model kelembagaan sesuai tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*research and development*). Menurut Gall & Borg (2003) *research and development* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membentuk produk dan prosedur baru, yang kemudian diuji dilapangan, dievaluasi, dan disaring secara sistematis sampai memenuhi kriteria keefektifan, kualitas, atau standar yang sama secara spesifik. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) penelitian pengembangan merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut metode *research and development* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan kemudian menguji keefektifan produk tersebut. Pada penelitian ini diadopsi dan dimodifikasi sepuluh langkah-langkah penelitian dari Gall & Borg (2003) dan Sugiyono (2010) menjadi 4 langkah, yaitu (1) identifikasi potensi dan masalah, (2) pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Pemerintah Daerah (OPD) tingkat Kabupaten Tambrauw, DPR Kabupaten Tambrauw, Pakar dari lembaga perguruan tinggi dan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan tentang kabupaten konservasi dan model kelembagaan yang akan dikembangkan. (3) Desain draft produk. Hasil wawancara dan identifikasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya dijadikan sebagai materi awal bagi kerangka kelembagaan kabupaten konservasi. (4) uji coba dan pengembangan model. Pada tahap ini, dilakukan uji coba model dan validasi model. Model divalidasi melalui mekanisme fokus group diskusi (FGD) dan konsultasi publik lintas yang melibatkan OPD, para pakar dan stakeholder.

Data penelitian

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini ada dua jenis, yaitu: data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari: (1) hasil wawancara dengan beberapa responden Pakar sebagaimana terlampir, (2) catatan lapangan, dan (3) data saran perbaikan draf model awal dan hasil observasi observer pada pelaksanaan uji coba (FGD/Konsultasi) dengan skala kecil dan besar. Data kuantitatif diperoleh dari: (1) penilaian skala nilai

validasi draf model, (2) penilaian pada skala nilai observasi pelaksanaan model, dan (3) penilaian skala nilai observasi keefektifan pelaksanaan model dalam ujicoba. Proses rancang bangun kelembagaan lokal kabupaten konservasi dilakukan mengacu pada terhadap 8 prinsip rancangan kunci yang ditawarkan oleh Ostrom (1990) tentang kelembagaan pengelolaan yang efektif terhadap sumberdaya alam lokal milik bersama (*common property*). Ke delapan prinsip tersebut selanjutnya dimodifikasi sebagai variabel yang dianalisis dalam membangun kelembagaan kabupaten konservasi, antara lain: 1) Batas wilayah kelola, 2) Mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, 3) Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal, 4) Dimilikinya mekanisme pemantauan sumberdaya alam, 5) Penyelesaian konflik, 6) Penerapan sanksi spesifik yang mengikat, 7) Berbagai bentuk masukan, 8) Dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA. Kedelapan prinsip-prinsip ini selanjutnya dijadikan sebagai variabel kunci dalam membangun kelembagaan lokal.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif dilakukan pada: (1) hasil penilaian validasi dengan skala nilai ahli materi terhadap draf model kelembagaan sebelum uji coba, (2) data penilaian hasil observasi para observer terhadap model uji uji coba dan pengembangan model.

Strategi Pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi Menggunakan SWOT

Objek dan Subjekk Penelitian

Objek penelitian adalah kebijakan Tambarauw sebagai Kabupaten Konservasi. Sedangkan subjek penelitian terdiri:

Tabel 2. Data Responden dalam penelitian Analisis SWOT

Kelompok	Jumlah Responden
Masyarakat adat	89 orang
OPD Sekabupaten Tambrauw	76 orang
Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)	9 orang

Sumber : Data Primer, 2018

Kampung dan distrik pengambilan data tersaji pada gambar 1 peta. Pengambilan data dilakukan di pada 89 responden dari 11 kampung dari 7 distrik di Kabupaten Tambrauw.

Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang di kumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara semi structural dan pengamatan lapangan. Data tersebut antara lain : Databiofisik kawasan, sarana dan prasarana pendukung, persepsi masyarakat dan manfaat sosial-ekonomi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen diperoleh dari instansi pemerintah di Kabupaten Tambrauw yang berkaitan dengan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi, seperti; Profil Kabupaten Tambrauw, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tambrauw 2012-2016; analisis program-program kerja Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berkaitan dengan adanya Kabupaten Konservasi serta analisis program kerja LSM/NGO yang berada di Kabupaten Tambrauw. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik SWOT. Analisis SWOT merupakan proses yang sebelum direncanakan terlebih dahulu merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang merupakan kunci keberhasilan kedalam kategori kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

BAB V. HASIL SEMENTARA

5.1. KELEMBAGAAN LOKAL KABUPATEN KONSERVASI

a. Variabel-variabel penyusun model kelembagaan lokal kabupaten konservasi

Proses rancang bangun kelembagaan lokal kabupaten konservasi dilakukan mengacu pada terhadap 8 prinsip rancangan kunci yang ditawarkan oleh Ostrom (1990) tentang kelembagaan pengelolaan yang efektif terhadap sumberdaya alam lokal milik bersama (*common property*). Ke delapan prinsip tersebut selanjutnya dimodifikasi sebagai variabel yang dianalisis dalam membangun kelembagaan kabupaten konservasi, antara lain: 1) Batas wilayah kelola, 2) Mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, 3) Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal, 4) Dimilikinya mekanisme pemantauan sumberdaya alam, 5) Penyelesaian konflik, 6) Penerapan sanksi spesifik yang mengikat, 7) Berbagai bentuk masukan, 8) Dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA.

b. Model Kelembagaan Kabupaten Konservasi

Kelembagaan merupakan kendala umum yang dihadapi dalam upaya implementasi Kabupaten Konservasi di Indonesia, termasuk yang akan ditetapkan di Kabupaten Tambrau. Kelembagaan yang lemah akan menyebabkan lemahnya aspek legal maupun inovasi untuk memperbaiki pendekatan pembangunan ekonomi yang cenderung eksploitatif terhadap sumberdaya alam. Karena itu kelembagaan yang kuat terutama di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kelembagaan masyarakat menjadi kunci menuju terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten Konservasi.

Kelembagaan merupakan aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak dan sebagainya dalam mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi (North, 1990; Rodgers, 1994). Aturan main yang mengatur hubungan manusia untuk menghambat munculnya perilaku oportunistik dan saling merugikan, sehingga perilaku manusia dalam memaksimalkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi (Kasper & Streit, 1998). Jenisnya terdiri dari kelembagaan internal/lokal seperti kebiasaan, norma-norma adat dan sebagainya serta kelembagaan eksternal seperti hukum atau kebijakan formal.

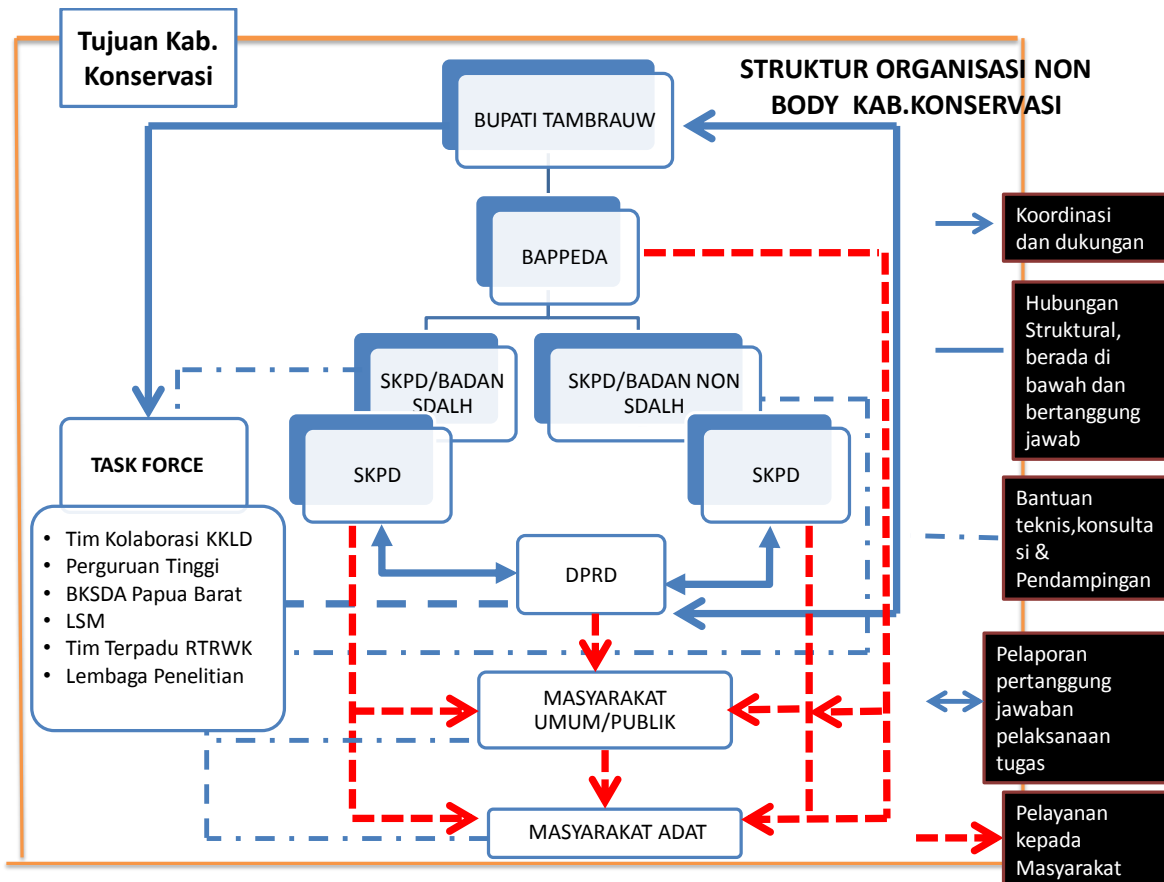
Peranan kelembagaan menentukan kesempatan-kesempatan ekonomi individu dan hasil akhir interaksi antar individu/organisasi terhadap kinerja ekonomi dan pengelolaan Sumberdaya agar tidak saling merugikan melalui aksi bersama (*Collective action*). Selain itu, mengatur interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui inovasi hak pemilikan (*property right*), batas yurisdiksi dan aturan representasi. Kelembagaan juga selalu disertai sanksi-sanksi (formal-informal) yang disepakati dan penegakannya. Kelembagaan tanpa sanksi adalah sia-sia.

Dalam upaya penetapan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, kelembagaan lokal yang ada perlu diidentifikasi untuk selanjutnya dibangun model kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Arah struktur kelembagaan kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi sebagaimana disajikan pada Gambar 3.

Struktur kelembagaan kabupaten konservasi di Tambrauw tidak melekat pada suatu lembaga atau berdiri sebagai institusi tersendiri melainkan suatu model birokrasi yang pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando. Struktur birokrasi secara umum mengacu kepada institusi institusi publik seperti kementerian dan badan-badan tertentu yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada standar legal dan formal (Giessen et al., 2014). Struktur birokrasi tidak hanya berada dalam satu aras saja, namun mencakup berbagai lembaga diberbagai level dari pusat sampai dengan lokal (Krott et al., 2014).

Bupati Kabupaten Tambrauw sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kabupaten konservasi berperan memberikan instruksi dan menerima laporan kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan setiap satuan kerja perangkat daerah (OPD) baik yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan hidup (SDALH) maupun non SDALH yang menjalankan program dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja tahunan (RENJA).

Pengembangan kelembagaan kabupaten Konservasi berkembang sesuai dengan dinamika dalam diskusi-diskusi dan semi-loka yang dibangun dengan stakeholder di Kabupaten Tambrauw sehingga muncul model kelembagaan sebagai berikut :



Gambar 3. Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi

Model kelembagaan ini telah dipresentasikan dalam semi loka bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Tambrauw dan telah di presentasikan secara khusus di depan DPRD Kabupaten Tambrauw.

Setiap program dan kegiatan SKPD tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam secara bijaksana. SKPD berbasis SDALH diharapkan dapat menetapkan 70% dari program dan rencana kerjanya berbasis konservasi. Sedangkan OPD non SDALH menetapkan minimal 30% program dan kegiatan yang mendukung upaya konservasi. OPD berbasis SDALH terdiri dari : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan dinas-dinas atau Badan non SDALH antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan lain-lain. Guna memberikan bantuan teknis dan pendampingan agar program kerja dan kegiatan sesuai dengan tujuan kabupaten konservasi maka

dibentuk tim konsultatif pembangunan kabupaten konservasi (TIM Konsul PKK) yang bersifat independen. Tim ini terdiri dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), NGO, Tim Kolaborasi KKLD Abun dan tim terpadu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Tim ini melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah Bupati Kabupaten Tambrauw.. Peran dan fungsi Tim Konsultasi PKK adalah memberikan bantuan teknis, pendampingan dan konsultasi terhadap SKPD, masyarakat adat, DPRD maupun masyarakat umum guna menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan indikator penetapan dan penilaian Kabupaten Konservasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tim ini selalu berkoordinasi dengan Bupati selaku penanggungjawab pelaksanaan.

DPRD Tambrauw merupakan lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi legislatif sehingga bertanggungjawab dalam menyediakan perangkat hukum daerah yang mendukung pembangunan kabupaten konservasi dan mengawasi/mengavaluasi upaya pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh setiap SKPD agar sesuai dengan tujuan pembentukan kabupaten konservasi.

Lembaga Masyarakat Adat merupakan representatif masyarakat adat dari setiap suku yang memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta selalu berkoordinasi dengan Tim PKK. Sedangkan masyarakat umum merupakan subyek dan obyek dari implementasi program dan kegiatan pembangunan berbasis konservasi, sehingga dapat memberikan saran-saran dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara tidak langsung.

Performansi Kelembagaan Kabupaten Konservasi

Kelembagaan Kabupaten konservasi yang baru didesain dan kelembagaan OPD yang sudah eksisting memiliki perbedaan secara struktur maupun aturan main. Kelembagaan OPD secara struktur terikat oleh struktur organisasi pemerintahan dan memiliki aturan main berdasarkan aturan-aturan pemerintah. Sedangkan kelembagaan kabupaten konservasi secara struktur bersifat *non body* dan memiliki aturan yang terbangun dari kombinasi antara aturan pemerintah dan masyarakat adat. Perbedaan tersebut mempengaruhi performansi atau kinerja dalam pembangunan kabupaten konservasi.

Performansi kelembagaan lokal dalam studi ini direpresentasikan oleh batas wilayah kelola, mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal, dimilikinya pemantauan sumberdaya alam, penyelesaian konflik, penerapan sanksi spesifik yang mengikat, berbagai bentuk masukan, dan dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Parameter Model Kelembagaan Kabupaten Konservasi

Model Kelembagaan		Batas wilayah kelola	Mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal	Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal	Dimilikinya pemantauan sumberdaya alam	Penyelesaian Konflik	Penerapan sanksi spesifik yang mengikat	Berbagai bentuk masukan	Dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA	Total
OPD	N	17	17	17	16	16	17	17	17	17
	Sum	129	134	222	89	99	139	188	113	1113
	Mean	7.588	7.882	13.059	5.563	6.188	8.176	11.059	6.647	65.471
	Mean Weigh t	2.529	2.706	2.629	2.781	3.094	2.794	2.765	3.324	2.619
	Std. Deviat ion	2.917	3.551	4.507	1.861	2.344	3.414	3.400	2.290	20.261
	Minimum	3	2	6	2	2	3	5	3	29
	Maximum	15	15	23	9	10	15	16	10	107
Kab.Konservasi	N	20	20	20	19	20	20	20	20	20
	Sum	242	231	377	149	147	221	296	160	1823

	Mean	12.100	11.550	18.850	7.842	7.350	11.050	14.800	8.000	91.150
	Mean Weight	4.033	3.850	3.770	3.921	3.675	3.683	3.700	4.000	3.646
	Std. Deviation	3.059	3.284	4.557	1.893	1.755	2.481	4.086	2.176	19.519
	Minimum	3	3	8	4	4	6	4	4	41
	Maximum	15	15	25	10	10	15	20	10	112

Sumber : Data primr Hasil Olahan, 2018

5.2. ANALISIS SWOT

Berdasarkan kondisi aktual pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Kosnervasi, maka terdapat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari masing-masing faktor faktor pembentukan Kabupaten Konservasi.

Tabel 3. Analisis SWOT Pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi

No	Faktor Kekuatan
1.	Luas wilayah 77-80% kawasan konservasi berdasarkan luasan hutan Tambrauw SK Menteri Kehutanan Nomor 783/2014.
2.	Adanya Komitmen politik pemerintah daerah dalam visi dan misi.
3.	Adanya pemberdayaan masyarakat oleh LSM/NGO dalam melestarikan dan menjaga asset budaya, tanah dan satwa yang dilindungi.
4.	Peran masyarakat dalam pelarangan perburuan illegal satwa dan tumbuhan.
5.	Adanya LSM/NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan.
6.	Adat istiadat yang masih kental.
7.	Potensi wisata yang dapat dikelola menjadi objek wisata.
8.	Adanya potensi Sumber Daya Alam (SDA) / Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dapat dikelola untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial budaya.
9.	Pengawasan kawasan konservasi /Dikontrol oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat
10.	Hasil Pertanian yang menunjang kehidupan masyarakat.
No.	Faktor Kelemahan
1.	Belum adanya sosialisasi terkait Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi.
2.	Pengetahuan masyarakat dan OPD masih kurang terkait kebijakan Kabupaten Konservasi.

3. Adanya indikasi tambang ilegal.
4. Kurangnya mutu pendidikan dan kesehatan.
5. Kelembagaan adat yang belum terstruktur.
6. Perambahan penduduk/perpindahan penduduk dalam membentuk kampung dan distrik baru.
7. Batas wilayah adat dan kampung yang belum jelas.
8. Adanya kampung yang masuk dalam kawasan hutan Cagar Alam.
9. Belum adanya penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konservasi dan Masyarakat adat.
10. Kurangnya pengawasan dan kontrol rutin oleh BBKSDA.
11. Pengetahuan masyarakat dan OPD masih kurang terkait Kabupaten Konservasi.
12. Adanya tambang ilegal.

No.	Faktor Peluang
1.	Menjadi perhatian LSM/NGO luar dan dalam negeri.
2.	Menjadi destinasi wisata.
3.	Adanya kebijakan pembentukan KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi).
4.	Penghargaan dan dukungan dari pihak luar dan dalam negeri secara berjenjang.
5.	Pemberdayaan masyarakat lokal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan.
6.	Potensi Corporate Sosial Responsibility bidang lingkungan.
7.	Menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
8.	Menjadi perhatian LSM/NGO luar dan dalam negeri.
9.	Menjadi destinasi wisata.
10.	Adanya kebijakan pembentukan KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi).
No.	Faktor Ancaman
1.	Indikasi Investasi kelapa sawit, tambang dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
2.	Ijin pemerintah daerah dalam pembangunan di wilayah Tambrauw (ahli fungsi lahan).
3.	Degradasi budaya akibat era-globalisasi.
4.	Arus transmigrasi yang makin meningkat.
5.	Ketimpangan ekonomi akibat kebijakan.
6.	Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal dimaksud, maka penelitian menentukan 3 faktor utama yang dianggap sangat crucial dari tiap-tiap unsur baik kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

3.1 Evaluasi Faktor Kunci

Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten yang sangat strategis untuk upaya konservasi sumberdaya alam, perlindungan sistem budaya dan adat maupun adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global. Dalam upaya mewujudkan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi, maka identifikasi faktor kunci (critical factor) sangat penting dilakukan. Faktor-faktor kunci itu kunci baik internal utama dan eksternal utama meliputi : Kekuatan (*Strength* , Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threat*) (Nur Sumedi *et al.*2012). Secara rinci faktor-faktor kunci tersebut dibahas lebih lanjut dibawah ini;

Tabel 4. Evaluasi Faktor Internal (EFI) Pembentukan Kabupaten Konservasi

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
Kekuatan			
Luas wilayah 77% Kawasan konservasi	0.30	4	1.20
Komitmen Politik Pemerintah Daerah melalui visi dan misi Pemerintah	0.30	4	1.20
Tingginya potensi wisata yang dapat dikelola menjadi objek wisata	0.10	4	0.40
Kelemahan			
Pengetahuan masyarakat & OPD masih kurang terkait Kabupaten Konservasi.	0.10	1	0.10
Kelembagaan adat belum terstruktur baik.	0.10	2	0.20
Kurangnya pengawasan dan kontrol BBKSDA terhadap aktivitas ilegal.	0.10	1	0.10
	1.00		3.20

Dari faktor kunci yang diidentifikasi, terdapat 3 faktor utama sebagai ‘Evaluasi Faktor Internal’ Ketiga faktor tersebut antara lain : luas kawasan konservasi sekitar 77 %, komitmen politik yang kuat melalui visi-misi pembangunan daerah, potensi wisata sebagai sumber PAD Kabupaten. Sementara 3 faktor internal yang menjadi kelemahan antara lain ; rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat tentang kebijakan Kabupaten Konservasi, kelembagaan adat belum terstruktur baik serta rendahnya kontrol dan pengawasan dari BBKSDA Papua Barat terhadap kawasan konservasi. Nilai hasil evaluasi EFI menunjukkan nilai 3.20. Meskipun terdapat

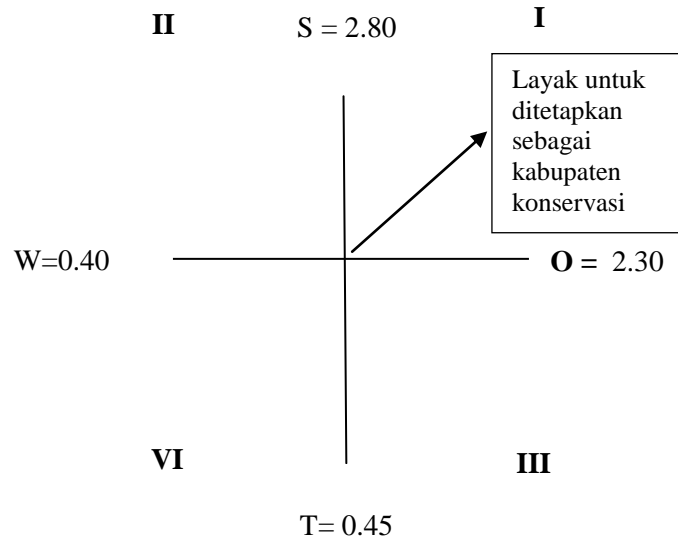
faktor kelemahan dalam proses pembentukan Kabupaten Konservasi, namun dapat tertutupi oleh faktor kekuatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor internal sangat mendukung pembentukan Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi yang ditunjukkan dengan nilai 3.20

Tabel 4. Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) pembentukan Kabupaten Konservasi

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
Peluang			
Menjadi destinasti wisata di Papua Barat.	0.35	4	1.40
Adanya kebijakan pembuatan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)	0.20	3	0.60
Menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata.	0.10	3	0.30
Ancaman			
Degradasi kearifan lokal akibat Era-globalisasi.	0.05	2	0.10
Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat-daerah.	0.05	2	0.10
Pencurian Satwa Liar dan tumbuhan dari oleh pihak luar.	0.25	1	0.25
	1,00		2.75

Hasil EFE menunjukkan nilai 2.75 (Tabel 2). Nilai tersebut dibawah EFI yang memperoleh nilai 3,20. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi akan memperoleh manfaat optimal dari peluang, meski memiliki keterancaman yang dihadapinya. Kondisi ini berarti bahwa faktor ancaman dapat ditutupi melalui optimalisasi faktor-faktor peluang pembentukan kabupaten Konservasi. Dinamika lingkungan eksternal berupa pengembangan potensi wisata, menguatnya kebijakan pengelolaan hutan melalui skema kesatuan Pengelolaan Hutan –Konservasi (KPH-Konservasi) serta kabupaten konservasi menjadi destinasi wisata di Papua Barat akan berpotensi meningkatkan manfaat dari pembentukan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi serta memperkecil faktor –faktor keterancaman. Lebih lanjut Fatem dan Asem (2014) mengatakan bahwa dua strategi pembentukan Kabupaten Konservasi dilakukan melalui strategi adaptasi dan strategi optimalisasi. Strategi optimalisasi dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dimana konsep *investasi hijau* menjadi leading sector. Salah satunya adalah sektor pariwisata di Kabupaten Tambrauw yang sementara dikembangkan. Sementara strategi adaptasi dilakukan melalui integrasi kebijakan Kabupaten Konservasi kedalam dokumen perencanaan daerah yakni RPJMD Kabupaten Tambrauw 2017-2022, Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) setiap organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya dari hasil analisis nilai faktor internal (3.20) dan eksternal (2.75) tersebut, kemudian dipetakan sesuai tipe masing-masing yaitu *strength*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats* dalam peta posisi kekuatan internal-eksternal dan di peroleh pembentukan Tambaui sebagai Kabupaten Konservasi.



Gambar . Hasil Peta Posisi Kuadran

Gambar 4. dengan jelas memperlihatkan bahwa nilai S dan O sangat besar dibandingkan W dan T. Dengan demikian, penancangan dan pembentukan Tambaui sebagai kabupaten konservasi dapat dilaksanakan dengan melihat strategi dari hasil analisis SWOT tersebut. Khususnya nilai internal dan eksternal terlihat bahwa nilai internal lebih besar dibandingkan dengan nilai eksternal dan berada pada kuadran I. Artinya situasi yang menguntungkan, untuk menjadikan Tambaui sebagai kabupaten konservasi sehingga dapat memanfaatkan formulasi rumusan strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi ini pada prinsipnya saling berkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal dalam mendukung pembentukan Tambaui sebagai kabupaten konservasi.

VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

6.1. Rencana Tahap Seminar Hasil

Dalam tahapan pra disertasi telah direncanakan untuk melakukan seminar hasil penelitian disertasi . Selaian itu saat ini peneliti sedang menunggu keputusan untuk penerimaan naskah jurnal kedua yakni strategi pembentukan Tambauw sebagai Kabupaten Konservasi menggunakan analisis SWOT.

6.2. Rencana Tahap Pasca Seminar Hasil dan Ujian Disertasi

Setelah seminar hasil dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan ujian disertasi maupun revisi naskah jurnal setelah direviu oleh tim jurnal.

6.3. Rencana Tahap Selanjutnya setelah Ujian Disertasi

Rencana tahap selanjutnya setelah ujian disertasi berupa advokasi kebijakan Kabupaten Konservasi, faktor-faktor SWOT yang berkaitan dengan kebijakan Kabupaten konservasi yang ditemukan dalam penelitian ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di kabupaten Tambrauw.

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, untuk menjawab tujuan penelitian yang ingin dicapai maka, kesimpulan sementara yang dapat di sampaikan antara lain:

1. Kelembagaan Kabupaten Konservasi penting untuk dibentuk sebagai unit yang bertanggungjawab dalam implemenasi misi kabupaten konservasi.
2. Struktur kelembagaan kabupaten konservasi di Kabupaten Tambrau tidak melekat pada suatu lembaga atau berdiri sebagai institusi tersendiri melainkan suatu model birokrasi yang pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando. Kelembagaan Kabupaten konservasi dibentuk sebagai upaya untuk mendorong *aksi kolektivitas* kabupaten konservasi melalui optimalisasi peran dan fungsi Bappeda selaku organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab penuh atas perencanaan dan evaluasi program setiap organisasi perangkat daerah.
3. Performansi kelembagaan lokal dalam studi ini direpresentasikan oleh batas wilayah kelola, mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal, dimilikinya pemantauan sumberdaya alam, penyelesaian konflik, penerapan sanksi spesifik yang mengikat, berbagai bentuk masukan, dan dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA.
4. Analisis SWOT, khususnya hasil analisis Faktor internal diperoleh 3 faktor kunci kekuatan sebagai Evaluasi Faktor Internal⁶⁷. Ketiga faktor tersebut antara lain : luas kawasan konservasi sekitar 77 %, komitmen politik yang kuat melalui visi-misi pembangunan daerah, potensi wisata sebagai sumber PAD Kabupaten. Sementara 3 faktor internal yang menjadi kelemahan antara lain; rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat tentang kebijakan Kabupaten Konservasi, kelembagaan adat belum terstruktur baik serta rendahnya kontrol dan pengawasan dari BBKSDA Papua Barat terhadap kawasan konservasi. Sementara evaluasi faktor eksternal yang menjadi peluang pengembangan kabupaten konservasi antara lain; pengembangan potensi wisata, menguatnya kebijakan pengelolaan hutan melalui skema kesatuan Pengelolaan Hutan – Konservasi (KPH-Konservasi) serta kabupaten konservasi menjadi destinasi wisata di Papua

Barat. Sedangkan faktor ancaman yang dihadapi antara lain ; Degradasi kearifan lokal akibat Era-globalisasi, Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat-daerah serta Pencurian Satwa Liar dan tumbuhan. Aspek keterancaman ini akan tertutupi secara perlahan-lahan melalui optimalisasi faktor-faktor peluang pembentukan kabupaten Konservasi diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asem G, Kahisiuw P, Fatem SM, Runtuboy Y, Marwa J. (2013). Prospect of Tambrauw as Conservation Regency in West Papua (A Preliminary Analysis). In: M.Taufik Fauzi, Komang Damar Jaya, Hoi Sen Yong, Miko Krisbaucm, M. Sarjan, Lestari Ujianto, Siti Latifa, Baiq Dewi Krisdayanti. Significance of Climate Change on Biodiversity in Sustaining the Globe. Proceeding of the 2nd International Conference on Biodiversity'. Universitas Mataram, Mataram, 2-4 July 2013.
- Angi EM, Santosa KD, Gunarso P. (2009). Kebijakan Kabupaten Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat. Tropenbos Internasional Indonesia Program.
- Badan Planologi, Departemen Kehutanan. (2005). Peta Kawasan Hutan dan Perairan, 1999. Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- Bappeda Tambrauw. (2011). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw.
- Baland JJP, Platteau. 1996. Halting degradation of natural resources: Is there a role for rural communities? Di dalam: Pagde A, Kim Y, Daugherty PJ. 2006. What Makes Community Forest Management Successful: A MetaStudy From Community Forests Throughout the World. Society and Natural Resources.
- Ciputra, (2002). Ciputra Quantum Leap, Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Fatem S. dan Asem G., (2015). 'Kabupaten konservasi sebagai political action pemerintah daerah dalam mendukung konservasi sumberdaya alam hayati: Studi kasus Kabupaten Tambrauw, Papua Barat' dalam *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON*. Volume 1, Nomor 5, September 2015. Hlm. 1403-1410. Volume 1, DOI: 10.13057/psnmbi/m0105xx
- Humphrey, A., S. (2005). SWOT Analysis for Management Consulting. SRI Alumni Association Newsletter December 2005
- Hanna S, M. Munasinghe. (1995). Property rights and the environment: Social and ecological Issues. Washington, DC: ESD
- Kasali R., 2010. Wira Usaha Muda Mandiri, Kiat Inspiratif Anak Muda Mengalahkan Rasa Takut dan Bersahabat dengan Ketidakpastian, Menjadi Wira Usaha Tangguh. Jakarta: Gramedia.
- Kartodihardjo. H. (2005). *Kabupaten Konservasi: Konsep, Kebijakan, Sistem Penetapan Penilaian Kinerja*. Dirumuskan dalam Lokakarya Pengelolaan Taman Nasional Multipihak dalam kerangka Kabupaten Konservasi, Tanggal 29 – 1 Desember 2005. IPB Bogor.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005. Departemen Pendidikan Nasional : Balai pustaka: Jakarta

- Mc Neely JA, Mainka SA. (2009). Conservation for a New Era. IUCN, Gland Switzerland.
- Murray G, Neis B, Johnsen JP. (2006). Lessons Learned from Reconstructing Interactions Between Local Ecological Knowledge, Fisheries Science, and Fisheries Management in the Commercial Fisheries of Newfoundland and Labrador, Canada. Di dalam: Human Ecology. Vol 34. NO 2. hlm: 549-571.
- Ostrom E., Schroeder L, Wyne S.(1999). Institutional Incentive and Sustainability Development, Oxford UK. Westview Press.
- Ostrom E. (1994). Neither Market nor State: Governance of Common-pool Resources in the Twenty-first Century. Washington, DC: International Food Policy Research Institute
- Ostrom E. (1990). *Governing the Common: The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York: Cambridge University Press.
- Osborn David dan Ted Gaebler (1993). Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector New York Plume.
- Parlee B and Berkes F. (2006). Indigenous Knowledge of Ecological Variability and Commons Management: A Case Study on Berry Harvesting from Northern Canada Human Ecology hlm. 34: 515–528.
- Pakpahan A. (1989). Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi. Di Dalam Pasandaran et.al. (ed) 1989. Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Bogor: Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Rangkuty, F. (2003). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21). Jakarta” Gramedia Pustaka Utama
- Sugiono., 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. CV. Bandung.
- Smith, EA, M. Wishnie. (2000). Conservation and Subsistence in Small-Scale Societies. Annual Review. Anthropology., No. 29: 493-524, 2000.
- Schmid A (1987). Property, Power, and an Inquiry into Law and Economic. New York: Praeger.
- Tim Universitas Papua. (2012). Studi Kebijakan Kabupaten Tambrau Sebagai Kabupaten Konservasi di Tanah Papua. Fakultas Kehutanan Unipa.
- Wade R. (1988). Village republics: economic conditions for collective action in south India. Di dalam: Pagde A., Kim Y., Daugherty P.J. 2006. What Makes Community Forest Management Successful: A Meta-Study From Community Forests Throughout the World. Society and Natural Resources.

LAMPIRAN

JURNAL

The image is a screenshot of a web browser displaying the article page for 'Land Use Policy' on the Elsevier ScienceDirect platform. The page features the Elsevier logo on the left and the journal title 'Land Use Policy' in the center. Below the title, the journal homepage URL is provided: www.elsevier.com/locate/landusepol. The main article title is 'Camouflaging economic development agendas with forest conservation narratives: A strategy of lower governments for gaining authority in the recentralising Indonesia'. The authors listed are Sepus M. Fatem^{a,b}, San A. Awang^a, Satyawan Pudyatmoko^a, Muhammad A.K. Sahide^c, Andita A. Pratama^a, and Ahmad Maryudi^{a,*}. Their affiliations are: ^a Faculty of Forestry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia; ^b Faculty of Forestry, Papua University, Manokwari, Indonesia; and ^c Faculty of Forestry, University of Hasanuddin, Makassar, Indonesia. The page is divided into 'ARTICLE INFO' and 'ABSTRACT' sections. The abstract begins with 'The government of Indonesia has recently recentralised the authority over forest resources. This p...'. The browser's address bar shows '699 (1 / 12)'. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screenshot.

Contents lists available at ScienceDirect

Land Use Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/landusepol

Camouflaging economic development agendas with forest conservation narratives: A strategy of lower governments for gaining authority in the recentralising Indonesia

Sepus M. Fatem^{a,b}, San A. Awang^a, Satyawan Pudyatmoko^a, Muhammad A.K. Sahide^c, Andita A. Pratama^a, Ahmad Maryudi^{a,*}

^a Faculty of Forestry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
^b Faculty of Forestry, Papua University, Manokwari, Indonesia
^c Faculty of Forestry, University of Hasanuddin, Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

ABSTRACT

The government of Indonesia has recently recentralised the authority over forest resources. This p...

699 (1 / 12)

Sepus Marten Fatem:

Thank you for submitting the manuscript, "STRATEGI PEMBENTUKAN TAMBRAUW SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI DI PAPUA" to Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management). With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:

<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/author/submission/22222>

Username: sepusfatem

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Dr. Yudi Setiawan, SP., M.Sc

Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)

•

manuscript URL:

<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/author/submission/22222>

Username: sepusfatem